

7

PENGEMBANGAN BISNIS BERBAHAN DASAR PANDAN DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI PENDEKATAN *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DENGAN POLA KLASER

Daniel, Dedy, Erowin, Azzuiraningsih, Welly Yulanda

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik dan saat ini sudah mulai dipandang oleh dunia dimana Indonesia sedang mengarahkan ekonomi masyarakatnya pada pasar global atau yang biasa disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kemudian pada saat ini, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) juga cukup meningkat. Hal ini juga dibuktikan dari kontribusi UMKM yang menyerap tenaga kerja dengan rata-rata sebesar 96,66% (Adhiningsih & al, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha pada sektor usaha kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikutip dari idxchannel.com pada Jumat, 14 Januari 2022, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun. Oleh karena itu, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan struktural, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011)

Provinsi Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terdapat lima Kabupaten yang memiliki wilayah kecamatan yang berada pada jalur perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Adapun permasalahan umum yang dihadapi pada jalur atau daerah perbatasan ini adalah kurangnya infrastruktur yang dapat berakibat terisolirnya wilayah perbatasan karena kesulitan akan akses jalan (Hendri & al, 2018). Salah satu kecamatan yang berada pada

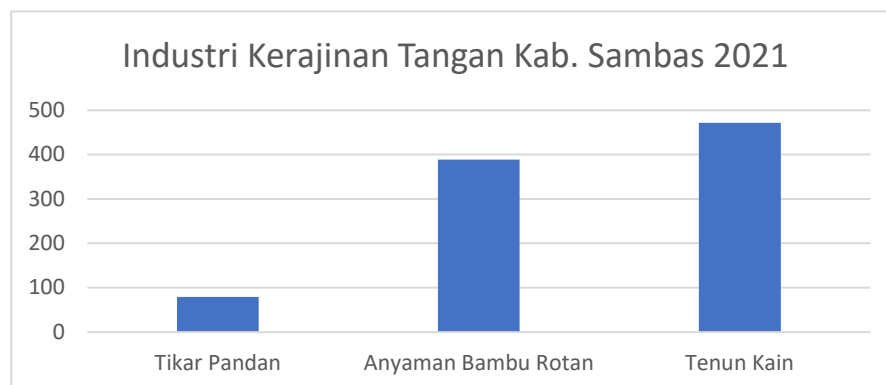
wilayah perbatasan adalah Sajingan Besar. Kecamatan Sajingan Besar memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dari sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Oleh karenanya, Pemerintah pusat menetapkan bahwa Kecamatan Sajingan Besar masuk dalam 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Penetapan ini dilakukan tentunya agar dapat mendorong pengembangan pada kawasan perbatasan negara.



Sumber: Dokumentasi, 2022

Gambar 1. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk

Pada tanggal 17 Maret 2017 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Sajingan Besar atau dikenal dengan sebutan PLBN Aruk diresmikan oleh Presiden RI, dan telah didukung juga dengan akses jalan saat ini yang dapat digunakan sebagai sarana dalam memperlancar arus sosial serta ekonomi masyarakat di perbatasan (Deri & al, 2022). Semakin berkembang daerah perbatasan tersebut hingga saat ini telah memiliki potensi sebagai jalur batas negara terdekat dengan ibu kota Sarawak, Kuching.



Sumber: <https://data.kalbarprov.go.id/>

Bagan 1. Jumlah Industri Kerajinan Tangan Kab. Sambas 2021

Masyarakat Kabupaten Sambas cukup banyak berpartisipasi dalam industri kerajinan tangan, beberapa daerah seperti Sejangkung, Kuala, Selakau, Nagur, dan Sajingan Besar memiliki potensi tersendiri dalam memanfaatkan kondisi alamnya untuk memproduksi atau membuat kerajinan. Adapun beberapa kerajinan yang ada di Kabupaten Sambas terdiri dari kerajinan Kain Tenun, Anyaman-Anyaman dari Rotan, Bambu, serta berbahan dasar pandan.

Dari Bagan 1 tersebut, dapat diketahui bahwa tenun kain merupakan kerajinan yang banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Berdasarkan hasil survei, tenun kain ini biasanya dibeli oleh turis yang singgah di Sambas terutama masyarakat Bangladesh yang di hari tertentu memerlukan kain tersebut untuk kegiatan adat atau tradisi.

Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki potensi sumber daya alam yang luas, karenanya daerah ini memiliki potensi dalam pengolahan kerajinan tangan berbahan dasar pandan yang biasanya diolah masyarakat 4 Kelurahan yang ada di sana yaitu Desa Kaliau, Sentaban, Sei Bening, dan Senatab. Masyarakat yang ada di Kecamatan Sajingan Besar rata-rata meluangkan waktunya untuk membuat kerajinan tangan. Anyaman ini diwariskan oleh leluhur menurut masyarakat di sana sehingga perlu untuk dilestarikan, hanya saja pada kenyataannya kalangan muda di Sajingan Besar tidak cukup berpartisipasi untuk melestarikan kerajinan tersebut, rata-rata masyarakat yang mengerjakan kerajinan pandan ini hanyalah kalangan tua itupun hanya sebatas mengisi waktu luang bukan sebagai profesi utama (Razak & Elyta, 2017). Kerajinan berbahan dasar pandan yang diproduksi oleh masyarakat Sajingan Besar memiliki dua model yaitu tikar pandan berbentuk original dan satu lagi merupakan tikar pandan dengan kreativitas dari segi maupun model warna.



Sumber: Dokumentasi, 2022

Gambar 2. Kerajinan Bambu, Rotan, dan Tikar, Gelang dan Tas dari Pandan

Selain tikar berbahan pandan, masyarakat juga melakukan inovasi produk dengan membuat tas dompet dari bahan dasar pandan sehingga jenis kerajinan lebih bervariasi. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah hasil produksi kerajinan belum mendapatkan wadah pemasaran yang tepat, hal ini menyebabkan masyarakat memproduksi kerajinan pandan berdasarkan jumlah pesanan yang masuk. Selain itu, kalangan anak muda juga mulai meninggalkan keterampilan anyaman, sehingga kesulitan dalam pelestarian budaya anyaman. Beberapa tindakan yang dilakukan Pemerintah Sajingan Besar seperti mengadakan *Expo* di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk serta memasarkan melalui tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sajingan Besar di Pasar Aruk sangat membantu masyarakat di sana dalam meningkatkan pengenalan kerajinan tangan yang menjadi ciri khas Aruk.

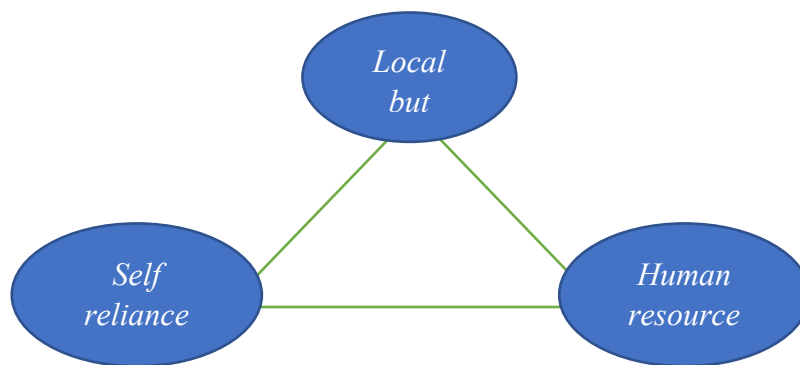


Sumber: Dokumentasi, 2022

Gambar 3. Stan Tim PKK di Pasar Aruk

Namun, strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah nampaknya belum cukup meningkatkan nilai pasar dari kerajinan pandan tersebut sehingga diperlukan pendekatan yang tepat. Hasil survei dan wawancara juga mensinyalir bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki pola pikir yang belum terlalu terbuka untuk menekuni dengan baik kerajinan berbahan pandan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan produk kerajinan pandan yang berhasil diproduksi ditumpuk di rumah warga hingga adanya pemesan atau bahkan menunggu adanya pemesan kemudian kerajinan pandan akan diproduksi. Konsep *One Village One Product* (OVOP) terlihat cukup berpotensi apabila diterapkan di Sajingan Besar, dimana hampir sebagian besar warga di sana menghasilkan anyaman berbahan

pandan. *One Village One Product* (OVOP) merupakan konsep pengembangan wilayah dengan mencanangkan satu produk unggulan sebagai bagian dari wilayah itu sendiri sehingga untuk menemukan produk tersebut menjadi cukup mudah. Prinsip-prinsip dari *One Village One Product* didasari dengan prinsip *local but global*, *self reliance and creativity*, dan *human resources and development* yang dapat digambarkan sebagai berikut (Rakhmawati, 2019):



Bagan 2. Prinsip Utama OVOP

Local but global mengedepankan prinsip dimana UMKM di desa harus dengan mengoptimalkan potensi lokal namun dapat diterima secara global. Kemudian *Self reliance and creativity* mengedepankan pengembangan potensi secara mandiri, inisiatif, dan sesuai kreativitas masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan *Human resources and development* merupakan program dengan pengembangan pada aspek sumber daya manusianya agar memiliki kemampuan dan kreativitas yang baik.

Adapun kriteria yang harus terpenuhi agar OVOP dapat diterapkan secara maksimal yaitu pertama, produk merupakan produk unggulan daerah. Kedua, produksi dapat dilakukan secara kontinyu dan ketiga, harus memiliki legalitas usaha sehingga dapat dipasarkan di pasar global. Upaya pengembangan kerajinan berbahan pandan tentunya harus dipertimbangkan berdasarkan faktor internal dan eksternalnya. Secara internal dapat dilihat dari aspek SDM, jaringan usaha, dan kemampuan dalam penetrasi pasar, kemudian secara eksternal dapat dilihat dari iklim usaha, dan sarana-prasarana (Widyastutik & al, 2010). Strategi OVOP dapat dikembangkan dengan fokus pola klaster. Klasterisasi merupakan pengelompokan kawasan tertentu dengan konsentrasi satu aktivitas kegiatan yang saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya. Dalam satu klaster harus dikembangkan dengan kerjasama dan peran

dari pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, riset dan pengembangan, maupun keuangan dengan harapan agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan melalui persebaran dan perluasan inovasi perusahaan di dalam klaster tersebut (Sumaryana, 2018).

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki peran dan kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan serta roda perekonomian suatu negara terutama negara Indonesia. UMKM dipercaya sebagai badan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja, sehingga keberadaannya bisa menunjang perekonomian dan menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan guna mempercepat proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang banyak memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan perekonomian daerah dan perekonomian nasional (Kurniawan, 2011). Usaha Mikro Kecil Menengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi dan Kriteria UMKM

No	Keterangan	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	<= Rp50 Juta	<= Rp300 Juta
2.	Usaha Kecil	> Rp50 Juta – Rp500 juta	> Rp300 Juta – Rp2,5 M
3.	Usaha Menengah	> Rp500 Juta – Rp10 M	> Rp2,5 M – Rp50 M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha mikro merupakan usaha perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan modal bersih sebesar Rp50.000.0000 serta memiliki hasil atau omset paling banyak sebesar Rp300.000.000. Adapun usaha kecil, merupakan usaha perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan modal bersih sebesar Rp50.000.000 – Rp500.000.000 dengan omset atau pendapatan kotor sebesar Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha menengah dengan modal bersih sebesar Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 dengan omset atau pendapatan kotor sebesar Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000.

***ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DENGAN POLA KLASTER**

One Village One Product mengedepankan pengembangan potensi wilayah dalam menghasilkan suatu produk berkelas global yang unik dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Pemerintah maupun swasta dapat mengembangkan konsep klasterisasi produk sehingga hasil produksi kerajinan menjadi lebih terpusat pada satu kerajinan. Ini dapat meningkatkan jumlah produksi dan persaingan masyarakat dalam membuat kerajinan berbahan dasar pandan. Adanya PLBN di Aruk juga dapat membantu arus informasi bagi para pengrajin pandan, sebab itu Pemerintah pun harus melakukan intervensi dengan skala yang lebih luas yaitu mencari investor maupun peminat kerajinan berbahan dasar daun pandan di negara sebelah sehingga hasil produksi masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal. Pola Klaster diharapkan dapat menumbuhkan modal sosial, dan kapasitas internal UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan (2014) menyatakan bahwa modal sosial adalah modal yang tidak berwujud dan berkaitan erat dengan hubungan sosial yang lebih menekankan pada rasa kepercayaan dan kebersamaan anggotanya. Melalui modal sosial ini, UMKM diharapkan memiliki jaringan horizontal yang dapat memunculkan simbiosis mutualisme yang baik dalam kerjasama dan koordinasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Dwiprabowo (2007) menyatakan bahwa pola klaster meningkatkan persaingan pasar dan menciptakan kondisi kompetitif sehingga kapasitas internal UMKM juga ikut meningkat dengan tujuan meraih keuntungan. Namun peluang kerjasama juga dapat terjadi yaitu melalui perjanjian produk setengah jadi atau komponen dalam memenuhi permintaan pembeli. Hal ini juga dapat menciptakan sub klaster baru dalam mendukung klaster inti, Oleh karenanya dalam pola klaster ini perlu dikembangkan dengan memperhatikan badan-badan yang dapat menopang keberlangsungan produk produk berbahan dasar pandan tersebut diantaranya seperti industri pendukung, penyedia jasa, Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. (Effendi & Dwiprabowo, 2007).

Industri Pendukung

Industri pendukung merupakan industri yang dapat mendukung keberadaan dari klaster industri inti. Daun pandan menjadi sumber bahan baku bagi pengrajin pandan dalam klaster inti. Melalui perkebunan pandan ini diharapkan kebutuhan akan daun pandan dapat tersedia sepanjang waktu dalam jumlah kapasitas yang besar terutama apabila kerajinan pandan mengalami peningkatan permintaan produk. Bahan baku pandan merupakan

faktor yang menentukan kualitas kerajinan pandan dan ini juga menentukan biaya produksi dari kerajinan-kerajinan tersebut.

Biasanya bahan baku yang digunakan adalah pandan yang memiliki duri disisi daunnya karena pandan jenis ini memiliki kualitas daun yang kuat dan mudah dibentuk. Sajingan Besar selain memiliki potensi keragaman kerajinan tangan ternyata potensi perkebunan dan pariwisatanya cukup besar pula, ini membentuk peluang tersendiri bagi masyarakat di sana dalam pengelolaan pandan. Selain itu, beberapa bahan pendukung juga diperlukan dalam memproduksi kerajinan pandan semisal pewarna yang digunakan untuk model warna dan pernak-pernik lainnya.

Penyedia Jasa

Penyedia jasa merupakan salah satu pendukung bagi kelancaran usaha klaster inti dalam memenuhi jumlah permintaan pasar. Penyedia jasa terdiri dari jasa-jasa keuangan, transportasi, maupun pengurusan dokumen. Melalui jasa transportasi, produk dapat sampai kepada konsumen. Sajingan Besar merupakan Kecamatan yang dekat dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk sehingga adanya jasa transportasi di daerah tersebut membantu pengenalan dan pemasaran produk secara global. Kemudian jasa keuangan seperti lembaga keuangan dapat membantu akses modal bagi para pengrajin pandan dalam meningkatkan kualitas produksinya dan hal terpenting adalah legalitas dari usaha kerajinan tangan tersebut sehingga dapat dijual pada pasar global.

Pemerintah Daerah

Keberadaan dari klaster inti di wilayah Sajingan Besar tentu akan memberikan dampak ekonomi yang cukup baik bagi daerah dan tentu menyerap tenaga kerja. Oleh karenanya, Pemerintah daerah memiliki peran penting dan wajib melakukan penjagaan atau bahkan mendorong klaster tersebut sehingga keberadaannya tetap eksis. Perspektif Pemerintah Daerah tidak berpatokan hanya sebatas pada pendapatan asli daerah, akan tetapi juga memperhatikan peranan klaster tersebut untuk jangka panjang sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penyumbang pajak. Berbagai hambatan peraturan daerah perlu ditinjau dan direvisi kembali, perbaikan sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan pihak swasta yang ingin menampung produksi klaster inti juga dapat menjadi alternatif baik sehingga produksi kerajinan pandan dapat meningkat dan dikumpulkan pada pasar yang telah tersedia.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga pendidikan dan pelatihan bersifat aplikatif, karena memberikan keterampilan dan keahlian tertentu bagi para pesertanya. Asumsi masyarakat akan kerajinan pandan yang sudah usang dan ketinggalan zaman dapat berpotensi hilangnya produk unggulan tersebut. Oleh karenanya, peran Balai Pelatihan dibutuhkan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan produksi kerajinan pandan dan ke depannya akan terus berkembang menggunakan teknologi baru dalam mendukung klaster inti ini.

MODEL POLA KLAS TER BISNIS KERAJINAN BERBAHAN PANDAN

Penerapan *One Village One Product* harus memenuhi kriteria produk unggulan daerah, diproduksi secara kontinu, dan memiliki legalitas usaha (Hendri & al, 2018). Kerajinan berbahan pandan di Sajingan Besar belum memenuhi kriteria tersebut oleh sebab itu, intervensi dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan produksi dan menjadikan produk kerajinan pandan sebagai bagian dari unggulan daerahnya.

Upaya-upaya pengembangan yang telah disebutkan sebelumnya terdiri dari faktor internal dan eksternal yaitu dimana faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia, jaringan usaha, dan kemampuan dalam penetrasi pasar. Sedangkan secara eksternal dapat dilihat dari iklim usaha, dan sarana-prasarana (Widyastutik & al, 2010). Produksi kerajinan berbahan pandan ini masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat terutama pada kalangan masyarakat tua yang dijadikan sebagai pekerjaan di waktu luang sedangkan kalangan muda sudah tidak berpartisipasi dalam produksi kerajinan pandan.

Hal ini berarti secara internal produksinya belum terlalu kuat, sedangkan secara eksternal telah disediakan sarana dan prasarana berupa pasar Aruk dan iklim usaha yang dibuat Pemerintah Daerah berupa pengadaan *Expo* kerajinan yang diadakan setiap tahun. Maka dari itu, untuk mengembangkan produk kerajinan berbahan pandan tersebut menjadi produk unggulan wilayah dapat mengembangkan pola klaster.

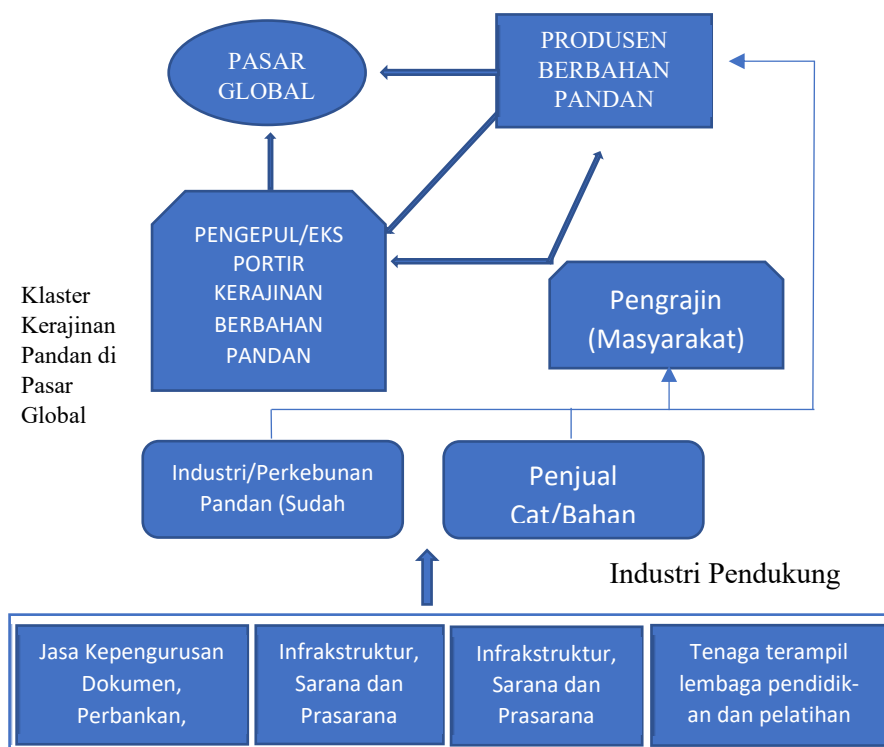
Pola klasterisasi yang diterapkan yaitu dengan menetapkan setiap daerah di Sajingan Besar untuk membuat kerajinan dari pandan yang lebih bervariasi model produknya mengikuti tren perkembangan di saat ini misalnya tas berbahan pandan, sendal berbahan dari pandan, topi berbahan dasar pandan, dan masih banyak bentuk yang dapat dibuat dari bahan dasar pandan.



Sumber: romadecade.org

Gambar 4. Model Kerajinan dari Bahan Dasar Pandan

Sehingga kesimpulannya interaksi yang terjadi di dalam kluster secara keseluruhan difokuskan pada produksi kerajinan berbahan pandan yang siap dipasarkan dan bahkan dapat dijadikan sebagai *souvenir* atau oleh-oleh bagi pendatang yang singgah di PLBN Aruk maupun wilayah Sajingan Besar. Oleh karenanya, perlu dibentuk beberapa bagian-bagian yang mendukung terciptanya siklus produksi kerajinan pandan secara berkala. Pemerintah/Swasta dapat mengarahkan diri pada pengembangan industri-industri kerajinan pandan dan melakukan penetrasi pasar global dengan memanfaatkan posisi wilayah yang merupakan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.



Bagan 3. Model Kluster Bisnis Kerajinan Berbahan Pandan

Apabila fokus ini berhasil, pertama yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat karena telah disediakannya industri kerajinan pandan sehingga masyarakat dapat menjual serta memasarkan kerajinan-kerajinan tersebut. Secara tidak langsung pula, adanya industri mampu menyerap tenaga kerja baru (kalangan muda akan termotivasi karena terbuka lapangan pekerjaan). Kemudian yang kedua, pengepul maupun eksportir kerajinan pandan akan muncul dengan sendirinya sehingga masyarakat pengrajin pandan pasarnya menjadi semakin luas. Selain daripada produsen dan pengrajin pandan, peningkatan produksi produk akan menyebabkan kebutuhan bahan baku menjadi semakin besar dan ini dapat mengembangkan potensi dalam perkebunan pandan sehingga untuk mendapatkan bahan baku produksi kerajinan pandan menjadi lebih mudah dan dampak ini juga terasa bagi penjual *cat/permish* atau bahan pendukung lainnya.

Ketika mencapai tingkat produksi dan menghasilkan perkembangan inovasi produk berbahan dasar pandan juga akan semakin bervariasi serta memberi keuntungan tersendiri bagi para pelaku penjual bahan pendukung produksi kerajinan pandan tersebut. Namun semuanya dapat berjalan dengan baik dengan adanya lembaga-lembaga pendukung seperti jasa transportasi, layanan legalitas, aturan Pemerintah Daerah, lembaga pelatihan dan pendidikan khusus, lembaga permodalan serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pola kluster seharusnya dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut dengan harapan kerajinan berbahan pandan yang diproduksi dapat menjadi produk unggulan di wilayah Sajingan Besar dan menjadi pusat sentra penghasil kerajinan pandan yang dikenal secara nasional maupun internasional/global.

SIMPULAN

Kecamatan Sajingan Besar merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terletak di Aruk. Potensi di daerah tersebut adalah masyarakatnya yang rata-rata merupakan pengrajin berbahan pandan. Kerajinan berbahan dasar pandan ini diproduksi ketika ada pesanan dan dijadikan sebagai pekerjaan sampingan di kala waktu luang oleh masyarakat kalangan tua, sebaliknya kalangan muda telah meninggalkan kebiasaan memproduksi kerajinan berbahan pandan. Melihat potensi yang dimiliki wilayah Sajingan Besar ini, Pemerintah Daerah dapat mendorong pengrajin pandan untuk tetap mempertahankan kebiasaan tersebut dan melakukan pengembangan jenis dan desain produk yang lebih kekinian seperti pengolahan pandan menjadi kerajinan berupa tas, topi, sandal, dan lain sebagainya sehingga dapat menarik perhatian dari pendatang di wilayah Sajingan Besar.

Konsep *One Village One Product* (OVOP) merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan perancangan model pengelolaan potensi ekonomi di daerah dengan tujuan agar wilayah dapat mengembangkan satu produk unggulan. Kerajinan berbahan dasar pandan dapat diarahkan menjadi produk unggulan wilayah Sajingan Besar, namun saat ini pengrajin pandan hanya sebatas pekerjaan sampingan dan dijalankan oleh kalangan tua. Sebab itu, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan model dengan pola klaster.

Klasterisasi merupakan pengelompokan kawasan tertentu dengan konsentrasi satu aktivitas kegiatan yang saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya. Dalam satu klaster harus dikembangkan kerjasama dan peran dari pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, riset dan pengembangan, maupun keuangan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan melalui persebaran dan perluasan inovasi perusahaan di dalam klaster tersebut. Potensi pengembangan industri kerajinan berbahan pandan sangat mungkin dilakukan di wilayah Sajingan Besar mengingat sebagian besar warga di sana memproduksi kerajinan pandan secara mandiri namun walaupun produk yang dihasilkan belum terlalu bervariasi.

Melalui industri kerajinan berbahan pandan diharapkan pengrajin pandan menjadi semakin aktif dalam melakukan inovasi produk dan memproduksi kerajinan pandan. Selain itu diharapkan muncul pengepul kerajinan berbahan pandan yang dapat berperan juga menjadi pasar bagi para pengrajin pandan. Hal ini juga akan berdampak pada industri-industri pendukung dan tentunya peran dari lembaga-lembaga swasta maupun Pemerintah diharapkan mampu mendukung peningkatan potensi ekonomi tersebut sehingga perekonomian di wilayah perbatasan semakin bertumbuh pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiningsih, A., & al, e. (2016). Strategi Pengembangan UMKM Pedesaan Menuju Entrepreneurs Village pada Pasar Global. *Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Esa Unggul*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2016). Kecamatan Sajingan Besar dalam Angka. Sambas: Badan Pusat Statistik.
- Deri, P., & al, e. (2022). Identifikasi Kondisi Terkini PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2021. Data Perusahaan Industri di Kabupaten Sambas. Available at: [Data Perusahaan Industri di Kabupaten Sambas - Datasets - SATU DATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT \(kalbarprov.go.id\)](https://kalbarprov.go.id) (Diakses, 2 November 2022)

- Effendi, R., & Dwiprabowo, H. (2007). Kajian Pengembangan Industri Furniture Kayu Melalui Pendekatan Kluster Industri di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 233-255.
- Hendri, I., & al, e. (2018). Model Sinergisitas Kelembagaan dalam Pengembangan Kewirausahaan UMKM Wilayah Perbatasan dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 118-131.
- Kurniawan, A. F. (2011). Interpretasi Pajak dan Persepsinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretatif). *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Rakhmawati, I. (2019). Pemberdayaan UMKM Berbasis "One Village One Product (OVOP) Sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan pada Industri Logam di Desa Hadipolo Kudus. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 17-30.
- Ramadhan, A. H. (2014). Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Pembentukan Kluster UMKM Mebel (Studi pada UMKM Mebel Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Razak, A., & Elyta. (2017). Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan di Perbatasan Sajingan Besar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Sosiohumaniora*, 213-217.
- Shifa Nurhaliza. 2022. Peran dan Potensi UMKM 2022 sebagai Penyumbang Terpenting di RI. Available at: [Peran dan Potensi UMKM 2022 Sebagai Penyumbang PDB Terpenting di RI \(idxchannel.com\)](https://www.idxchannel.com) (Diakses, 24 September 2022)
- Sumaryana, F. D. (2018). Pengembangan Kluster UMKM dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha. *JISPO*, 58-68.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Widyastutik, & al, e. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kluster UMKM Alas Kaki di Kota Bogo yang Berdaya Saing. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 16-26.